

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



**Nama : Erlinda
NIM : 222015023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



**Nama : Erlinda
NIM : 222015023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Erlinda
NIM : 222015023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan
Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan
Nama : Erlinda
NIM : 222015023
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, 2019

Pembimbing I,



D.R. Sa'adah Siddik, SE., M.Si, Ak, CA
NIDN/NBM : 0002095507/972321

Pembimbing II,



Betri, SE., M.Si., Ak, CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Mengetahui,
Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, SE., M.Si., Ak, CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erlinda

NIM : 22 2015 023

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan



Erlinda

Abstrak

Erlinda/222015023/2019/Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Variabel dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kinerja pemerintah. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain pendapatan asli daerah yang diterima lebih kecil dari bantuan pemerintah sedangkan penerimaan dana perimbangan setiap tahun mengalami peningkatan. Kemandirian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik dengan rata-rata sebesar 65,28 %, derajat desentralisasi kinerja pemerintah sudah cukup baik dengan rata-rata sebesar 38,66 %, ketergantungan kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih tinggi dengan rata-rata sebesar 58,64 %, efektivitas kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah cukup efektif dengan rata-rata sebesar 92,91 % dan pertumbuhan pendapatan daerahnya kurang baik tetapi mengalami pertumbuhan positif.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kinerja pemerintah

Abstract

Erlinda/222015023/2019/Analysis of Regional Original Income and Balancing Funds in Improving the Performance of the Government of the Province of South Sumatra.

This study aims to determine the analysis of local revenue and balance funds in improving the performance of the Government of the Province of South Sumatra. This type of research is descriptive research. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of the Province of South Sumatra. The variables in this study are local revenue, balance funds and government performance. The data used are primary and secondary data with data collection techniques using questionnaires and documentation. Based on the results of research that has been conducted on all data obtained in the Regional Financial and Asset Management Agency, some conclusions can be drawn, among others, that the regional revenues received are smaller than government assistance while the receipt of balance funds every year has increased. The independence of the performance of the government of South Sumatra Province has been quite good with an average of 65.28%, the degree of decentralization of government performance has been quite good with an average of 38.66%, dependence on the performance of the government of South Sumatra Province is still high with an average of 58 , 64%, the effectiveness of the government performance of the South Sumatra Province in managing local revenue is quite effective with an average of 92.91% and poor regional income growth but experiencing positive growth.

Keywords: local original income, balance funds and government performance

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga penulisan skripsi dengan judul **Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Seorang calon sarjana harus peka terhadap lingkungannya, termasuk menyikapi fenomena terkait dengan peningkatan kinerja pemerintah. Sebagai calon sarjana akuntansi, penulis mencoba untuk berkontribusi dengan melakukan penelitian mengenai kaitannya dengan permasalahan ini, dengan memasukkan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Variabel kinerja pemerintah dipilih karena variabel ini berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Saat ini pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah lebih kecil dari penerimaan dana perimbangan atau bantuan dari pusat, sehingga kinerja pemerintah dinilai kurang mandiri atau masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui analisis pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Hasil dari penelitian ini

adalah pendapatan asli daerah yang diterima lebih kecil dari bantuan pemerintah sedangkan penerimaan dana perimbangan setiap tahun mengalami peningkatan. Kemandirian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik dengan rata-rata sebesar 65,28 %, derajat desentralisasi kinerja pemerintah sudah cukup baik dengan rata-rata sebesar 38,66 %, ketergantungan kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih tinggi dengan rata-rata sebesar 58,64 %, efektivitas kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah cukup efektif dengan rata-rata sebesar 92,91 % dan pertumbuhan pendapatan daerahnya kurang baik tetapi mengalami pertumbuhan positif.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta (Bapakku Untung dan Ibuku Harsini)serta keluarga yang telah memberi semangat, mendoakan dan memberikan dorongan baik materil maupun spirit yang tiada hentinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu DR. Sa'adah Siddik, SE., M.Si, Ak, CA dan Bapak Betri, SE., M.Si, Ak, CA yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/ karyawanati Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepala serta pegawai di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Palembang,

2019

Erlinda

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Pustaka.....	11
1. Landasan Teori	11
a. Kinerja Pemerintah	11

1) Pengertian Kinerja Pemerintah	11
2) Tujuan Pengukuran Kinerja	13
3) Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja	14
4) Indikator Kinerja Pemerintah Daerah.....	14
5) Informasi yang Digunakan dalam Penilaian Kinerja.....	19
6) Pihak-Pihak yang Berkepentingan dengan Rasio Keuangan pada APBD	25
7) Keterkaitan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan Kinerja Pemerintah	26
B. Penelitian Sebelumnya	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Operasionalisasi Variabel	37
D. Data yang Digunakan	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	39
1. Analisis Data	39
2. Teknik Analisis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	42
1. Gambaran Umum BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	42
2. Visi dan Misi	43

3. Struktur Organisasi	43
4. Tugas Pokok dan Fungsi	44
5. Data	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
1. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	54
a. Analisis Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	54
b. Analisis Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	56
1) Rasio Kemandirian.....	59
2) Derajat Desentralisasi.....	60
3) Rasio Ketergantungan	62
4) Rasio Efektivitas	65
5) Rasio Pertumbuhan	66
 BAB VSIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan, dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka kinerjanya jelek (Yoyo, 2017: 8-9).

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit (Ramli, 2016: 9). Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (Ramli, 2016: 21).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah

dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul, 2008:230). Rasio keuangan ini merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja keuangan.

Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian, juga dapat dinilai kemampuan pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya ekonomi secara efektif. Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja pemerintah dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target atau kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah (Ramli, 2016: 138).

Dalam menganalisis kinerja keuangan ini menggunakan informasi yang terdapat pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah terdiri atas laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja program atau kegiatan. Penyampaian LKPJ dan evaluasi kinerja pada kinerja keuangan menggunakan laporan keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan keuangan perusahaan daerah (Mahmudi, 2016: 19).

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Permendagri No. 21 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa pengelolaan

keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri tercermin pada derajat otonomi fiskal (kemampuan keuangan daerah), dengan menggunakan analisis rasio yang membandingkan indikator atau elemen-elemen keuangan daerah pada APBD-nya, yang notabene dikelola oleh pemerintah daerah sebagai institusi yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dalam analisis derajat otonomi fiskal, akan tercermin atau teranalisis kinerja keuangan daerah dan penilaian terhadap manajemen keuangan daerah berdasarkan rasio-rasio keuangan, terutama berkaitan dengan akuntabilitas (pertanggungjawaban) penggunaan keuangan daerah secara benar dan tepat (Hessel, 2005: 89).

Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk beberapa aspek yakni aspek finansial dan nonfinansial. Informasi yang digunakan untuk pengukuran aspek finansial diperoleh dari menganalisis varians pendapatan, varians pengeluaran, varians belanja rutin dan belanja investasi/ modal. Sedangkan aspek nonfinansial diperoleh kepuasan pelanggan, operasi dan pasar internal,

kepuasan pegawai, kepuasan komunitas dan *stakeholders* dan waktu (V. Wiratna, 2015: 110).

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan informasi yang tersedia dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: 1) pendapatan, 2) transfer, 3) belanja, 4) surplus/defisit, 5) penerimaan pembiayaan, 6) pengeluaran pembiayaan, 7) pembiayaan neto, 8) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (*silpa/sikpa*) (Ramli, 2016: 19).

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba. Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Windhu, 2018: 49).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pada laporan kinerja keuangan dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan kinerja. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan dan beban.

Meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan informasi yang ada pada laporan realisasi APBD yang mencakup pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pendapatan asli

daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah, yang selanjutnya disebut kekayaan daerah (Wempy, 2017: 91). Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Sehingga PAD ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Mahmudi, 2016: 140). Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja yang positif (Muhammad, 2014: 88).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan ini diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat memacu meningkatkan kinerja keuangannya dalam mewujudkan desentralisasi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mihaela (2013) dan Joko (2014) Welio (2016) dan Riska, et al (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah mengalami kenaikan dan penurunan atau masih rendah sekali. Penelitian yang dilakukan oleh Welio (2016), Riska, et al (2017) dan Khayatun, et al (2017) pada efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dan penurunan dan

dalam pengeluaran biaya untuk memperoleh pendapatan asli daerah belum efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Mihaela (2013), Mohar (2016) dan Anim (2016) dengan hasil menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat dari derajat otonomi fiskal berada pada level cukup, dalam mengelola pendapatan asli daerah sudah sangat efektif tetapi jika dilihat dari ketergantungan daerah masuk dalam kriteria tinggi atau masih bergantung pada pemerintah pusat dan jika dilihat dari rasio efisiensi dalam menggunakan dananya masih belum berimbang. Penelitian yang dilakukan oleh Khayatun, et al (2017) dan Riska, et al (2017) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah jika dilihat dari rasio kemandirian dianggap mampu dan mandiri melaksanakan urusan otonomi daerah dan pada derajat desentralisasi setiap tahun menunjukkan kategori sedang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera yang terdiri dari 17 kabupaten/kota. Dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya dibutuhkan sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja keuangan serta kondisi keuangannya. Berikut disajikan pada Tabel I.1 pendapatan asli daerah dan dana perimbangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2012-2017:

Tabel I.1
Persentase Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2012-2017

Tahun	RK	Ket	DD	Ket	RKn	Ket	RE	Ket	RPrPAD	RPrTP
2012	57,14 %	Sedang	38,31 %	Cukup	60,42 %	Sangat Tinggi	104,92 %	Sangat Efektif	0,082%	0,317%
2013	59,01 %	Sedang	36,97 %	Cukup	62,65 %	Sangat Tinggi	91,29 %	Cukup Efektif	9,98%	0,046%
2014	63,60 %	Sedang	38,74 %	Cukup	60,92 %	Sangat Tinggi	93,33 %	Cukup Efektif	0,198%	0,143%
2015	73,99 %	Sedang	42,30 %	Baik	57,18 %	Sangat Tinggi	88,25 %	Kurang Efektif	0,046%	0,041%
2016	63,30 %	Sedang	38,67 %	Cukup	61,10 %	Sangat Tinggi	82,29 %	Kurang Efektif	0,220%	0,168%
2017	74,65 %	Sedang	36,98 %	Cukup	49,55 %	Tinggi	97,37 %	Cukup Efektif	0,243%	0,353%

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Selatan (Data diolah kembali), 2019

Keterangan:

- RK : Rasio Kemandirian
- DD : Derajat Desentralisasi
- RKn : Rasio Ketergantungan
- RE : Rasio Efektivitas
- RPrPAD : Rasio Pertumbuhan PAD
- RPrTP : Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Berdasarkan Tabel I.1, menunjukkan fenomena bahwa tingkat rasio kemandirian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 6 tahun yaitu tahun 2012-2017 masuk dalam level sedang atau dengan kata lain peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan dan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Tetapi jika dilihat dari nominal persentasenya mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini dikarenakan PAD yang dihasilkan mengalami penurunan. Ini mengakibatkan ketimpangan antara teori dengan kenyataan

yaitu semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya (Ramli, 2016: 138).

Berdasarkan derajat desentralisasi, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Sumatera Selatan masuk dalam kriteria cukup. Tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan derajat desentralisasinya dan tahun berikutnya mengalami penurunan yang disebabkan oleh penerimaan PAD lebih kecil dari penerimaan total pendapatan. Ini mengakibatkan ketimpangan antara teori dengan kenyataan yaitu semakin tinggi kontribusi PAD dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja daerah yang positif (Muhammad, 2014: 88).

Berdasarkan rasio ketergantungan menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam kriteria sangat tinggi atau masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena pendapatan transfer atau dana perimbangan lebih besar dari penerimaan pendapatan daerah. Ini mengakibatkan ketimpangan antara teori dengan kenyataan yaitu semakin tinggi rasio maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, sehingga kinerja pemerintah belum menunjukkan hasil yang optimal (Mahmudi, 2016: 140).

Berdasarkan rasio efektivitas menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cukup efektif dalam mengelola keuangannya dan

dalam memperoleh pendapatan asli daerahnya. Secara teori, semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan pemerintah daerahpun semakin baik (Windhu, 2018: 63).

Berdasarkan rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan positif, terutama pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan pada tahun 2013, meskipun tahun berikutnya mengalami penurunan, begitupun juga dengan pertumbuhan total pendapatan mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah analisis pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui analisis pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Pemerintah

Untuk membantu pemerintah sebagai acuan pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja pemerintah.

3. Bagi Almamater

Untuk dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Anim Rahmayati (2016, Maret). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA*, 1(1): 40-54.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Data Laporan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Selatan.
- Baldric Siregar. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Budianto dan Stanly W Alexander (2016, Desember). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(4): 844-851.
- Deddi Nordiawan. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. Cetakan Pertama. Jakarta: Grasindo.
- Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi 3)*. Jakarta : Erlangga.
- Joko Pramono (2014, Juli). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Among Makarti*, 7(13): 83-112.
- Khayatun Nufus, dkk (2017). *Analysis Of Financial Performance Of Local Government Through South Tangerang Calculation Of Realization Regional Budget*. *European Journal of Business and Management*, 9(3): 136-146.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi 2)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi 3)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Mihaela Brindusa (2013). *The Analysis Of The Financial Performance Of Local Authorities In The Context Of Budgetary Constraints. Management and Marketing Challenges for The Knowledge Society*, 8(3): 553-574.
- Moeheriono. (2012). *Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Mohar Mondes (2016, Oktober). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(2): 101-118.
- Muchson. (2017). *Metode Riset Akuntansi*. Bogor : Guepedia.
- Muhammad Amir Arham .(2014). *Kinerja Perekonomian dan Keuangan Daerah* .Cetakan Pertama. Yogyakarta : Deepublish.
- Nur Achmad Budi Yulianto, dkk. (2018). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Malang : POLINEMA PRESS.
- Nurlan Darise. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : PT Indeks.
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Ramli Faud. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Riska Korompot, dkk (2017). *Analysis Of Financial Performance In The Government Of North Sulawesi. Journal Accountability*, 6(2): 09-19.
- Rosmiaty Tarmizi, dkk (2014, September). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Setelah Memperoleh Opini WTP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2): 71-90.
- Sri Suranta, dkk (2017, Desember). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 5(2): 111-124.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Teguh Endaryanto, dkk (2018, Maret). Analisis Kinerja Ekonomi dan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(1): 95-102.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Welio Wonda (2016, September). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Jurnal EMBA*, 4(3): 192-200.
- Wempy Banga. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Windhu Putra. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Yoyo Sudaryo, dkk. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.

